

**POLA AFILIASI INFORMAL ORGANISASI GERAKAN MAHASISWA  
DENGAN PARTAI POLITIK**

**(STUDI KASUS SISTEM KADERISASI KESATUAN AKSI MAHASISWA  
MUSLIM INDONESIA DENGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)**

Oleh:

Linggar Kharisma Suseno

(14010110120028)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

*Abstract*

*A long controversy about an ideal relationship which is required to be knitted between instrument of political infrastructure, interest group and political party in a statehood framework, has always been an actual topic. The purpose of this study to describe the general relationship between students as a interest group against the movement patterns of political parties - the regeneration system - as one element of a political infrastructure, in an effort to create a healthy political climate. For some people who support the need of a harmonious wickerwork between the two of those institution, the existence of the affiliation is actively necessity. However, Not a few among the other observers, have different opinion to respond this social phenomena. Two of the leading persons who are standing against the indication of affiliate relation which is built between the two of those institution, Julien Benda and Arief Budiman. Benda, this well-known French man assumes that 'interest' becomes a differentiator key of fundamental framework between the two of those institutions. As well as Benda said, Arif who is well-known in student movement over the era of 1996 reveals things in common. For Arif, the moral movement which is carried by interest group, such as student movement organization is required to be given a space when it is juggled with political movement, which becomes the main characteristic of political parties. After the long controversy is taken place, the appearance of Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the same time and era, reformation era was not occurred without intentional element. As an interest distributor tool of populace of tarbiyah, The appearance of the two of those institution which have different roles and functions, becomes a sign that there is new paradigm about the relationship between interest group and political party after the fall of new order regime. One of the form of affiliations which is knitted between the two of those institution of tarbiyah movement can be*

*mainly seen in the regeneration that is used in it. In the regeneration thing, the two institutions tend to use the same pattern, and unique. Regeneration models run with a system called halaqah, where there are small groups led by a leader / Murabbi. This invention witness the ideas of those leading persons mentioned above, about the ideal relation which is supposed to be used by the interest group and political party. Halaqah method is an effective method in the process of transforming ideas keIslaman, by breaking a large group into smaller groups. However, this method is also very prone to saturation level, then there is need for some breakthrough-breakthrough and innovation in the implementation process. This research was conducted using descriptive analytic method, with purposive sampling techniques to determine key informants.*

**Keywords:** KAMMI, PKS, Affiliation, Regeneration.

## **A. PENDAHULUAN**

Semenjak eskalasi reformasi terjadi, kendi kebebasan yang telah lama dirindukan rakyat akibat koersi yang telah melanda negeri hampir tiga dekade lebih ini memang menjadi obat paling manjur dalam mengatasi pelbagai masalah bangsa. Seperti kita mafhum, gejolak sosial 1998 yang tak hanya mengakibatkan timbulnya krisis moneter, pun juga dengan pelbagai persoalan lain seperti merebaknya kasus-kasus pelanggaran HAM. Menjadikan bangsa ini tak hanya mengalami goncangan yang hebat, tetapi juga mengubah pelbagai konstelasi sosio-politik bagi ranah ketatanegaraan.

Peralihan rezim otoritarian menuju iklim demokrasi yang dihamba sejak puluhan tahun silam, berakibat pada Indonesia yang muncul menjadi buah bibir dikancah internasional. Bukan sekedar isapan jempol belaka memang, jika kita mesti melihat realita bahwa dibukanya keran kebebasan akibat arus demokrasi membuat sistem kenegaraan serta merta mengalami perubahan drastis.

Salah satu akibat nyata dari fenomena yang terjadi dapat kita tinjau dari semakin diakui peran masyarakat madani (*civil society*) dalam prosesnya mengakses negara. Jika pada masa orde baru sistem pembagian kekuasaan hanya berfokus pada peran negara dan swasta, maka dengan lahirnya reformasi akses rakyat terhadap pilihan-pilihan negara menjadi sebuah keniscayaan.

Pelbagai kebebasan yang didapat oleh rakyat, pun amat dimanfaatkan betul bagi seluruh kalangan demi menyalurkan hasratnya dalam segala aspek sosial. Salah satu bentuk hasrat sosial yang dikehendaki yakni dengan maraknya rakyat yang berbondong-bondong mendirikan macam organisasi, baik beraliran politik maupun non-politik. Dalam hal politik, dapat kita lihat betapa pesatnya pertumbuhan jumlah partai politik pada medio 1998 hingga 1999. Terhitung semenjak Mei 1998 - Februari 1999, tak kurang muncul 160 partai politik baru<sup>1</sup>. Hal ini menandakan bahwa kebebasan yang baru dijalani rakyat kala itu, memang amat ditunggu-tunggu sekalipun memakan waktu yang cukup lama.

Salah satu kalangan rakyat yang sangat memanfaatkan momentum demokrasi ini, adalah kaum *tarbiyah*. Kaum *tarbiyah* merupakan sebuah gerakan yang diusung oleh para penggerak dakwah Islam yang memiliki cita-cita tata kelola sosial, dijalankan sesuai nafas Islam. Gerakan *tarbiyah* ini sebenarnya telah terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga rohani Islam (Rohis) yang ada di jenjang sekolah menengah hingga kampus.

---

<sup>1</sup> Ali Said Damanik. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002. Hlm. 218

Gerakan *tarbiyah* sebenarnya telah dimotori sejak tahun 1986, ditandai dengan berdirinya sebuah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK)<sup>2</sup>. Keberhasilan gerakan mahasiswa dalam menggulingkan rezim orde baru juga tak bisa lepas dari sumbangsih gerakan *tarbiyah* dalam bentuk elemen gerakan mahasiswa. Gerakan *tarbiyah* ini masuk kedalam lembaga-lembaga intra kampus maupun ekstra serta berperan aktif dalam perancangan terjadinya reformasi 1998.

Salah satu bentuk nyata eksistensi gerakan *tarbiyah* ini dapat kita jumpai pada proses terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang lahir pada 29 April 1998, melalui sidang khusus pada gelaran muktamar FS-LDK ke-X se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Acara yang dihadiri oleh 59 LDK dan berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) diseluruh Indonesia dengan jumlah peserta keseluruhan kurang lebih 200 orang yang merupakan para aktivis dakwah kampus. Naskah pendirian KAMMI kemudian dituangkan dalam sebuah deklarasi, yang bernama Deklarasi Malang.

Lahirnya KAMMI sebagai wujud adanya kelompok kepentingan (*interest group*) dalam kerangka negara, merupakan sebuah komitmen dari gerakan *tarbiyah* dalam mengawal agenda-agenda reformasi. Seolah tak puas dengan membentuk lembaga *interest group*, serta diiringi dengan kesadaran kolektif akan perlunya gerbong politik yang lebih besar demi mewujudkan cita-cita lain, menjadikan sistem tatanan sosial yang bernuansa Islami. Ditambah dengan momentum perubahan reformasi, maka gerakan yang lebih revolusioner kembali

---

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 182

ditempuh gerakan ini dengan membentuk sebuah partai politik (*political party*), bernama Partai Keadilan (PK) yang dikemudian hari berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena tak lolos batas ambang pemilu (*electoral threshold*) pada pemilu 1999.

PK didirikan pada tanggal 9 Agustus 1998, tepat di depan pelataran masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. PK lahir sebagai respon atas jajak pendapat yang dilakukan para penggerak *tarbiyah*. Berbekal 6000 eksemplar *questioner* yang disebar dikalangan aktivis dakwah, keputusan mendirikan partai politik menjadi *ijtihad*/kesepakatan bersama yang dimufakati.

Pada mulanya, tak banyak yang menyangka bahwa munculnya KAMMI dan PK akan memberikan dampak yang cukup besar dalam percaturan politik nasional. Namun dengan perlahan tapi pasti, eksistensi kedua lembaga yang dibidani oleh gerakan *tarbiyah* ini mulai mendapatkan tempat dihati rakyat. Tak disangka, dalam perjalannya yang baru seumur jagung, baik KAMMI maupun PK mengindikasikan hal positif bagi prospek keduanya dalam proses mencapai cita-cita besar *tarbiyah*.

Betapa tidak, di usianya yang terbilang muda, KAMMI secara cepat dapat beradaptasi dengan iklim kampus dan membangun jaringan yang luas. Tercatat kader KAMMI sudah mampu menjadi pemimpin kampus (Ketua BEM) hampir di 300 kampus nasional. Tak sampai disitu, hingga saat ini KAMMI terdiri dari 17 KAMMI Wilayah, 72 KAMMI Daerah, dengan 500 komisariat di seluruh propinsi

di Indonesia. Serta 3 KAMMI Luar Negeri di 2 negara, dengan jumlah kader menembus angka 40.000<sup>3</sup>.

Hal serupa juga dapat kita tilik pada perkembangan PK, di tahun-tahun setelahnya berdiri. Pada pemilu pertamanya ditahun 1999, PK berhasil merebut hati pemilih sebanyak 1.436.565 suara atau 1,36% dari total jumlah suara, jumlah yang cukup signifikan bagi sebuah partai baru. Terobosan kembali digalakan ketika PK berhasil menambah jumlah kadernya yang berjumlah 33 ribu kader – pada tahun 1999, menjadi 500 ribu kader pada tahun 2004<sup>4</sup>. Alhasil pada pemilu tahun 2004 sebagai pemilu kedua yang diikuti, PKS – saat itu telah berubah nama menjadi PKS, karena perolehan suara pada pemilu sebelumnya tidak memenuhi batas ambang *electoral threshold* sebesar 2% yang diatur dalam UU No.3 tahun 1999, berhasil mendulang suara sebesar 8.325.020 suara atau 7,34% dalam presentase, sungguh prestasi luar biasa yang ditempuh hanya dengan jeda waktu lima tahun<sup>5</sup>.

Tren positif juga masih menaungi PKS hingga pemilihan umum tahun 2009, dimana suara PKS kembali mengalami kenaikan presentase – meskipun jumlah suara menyusut, sebesar 8.206.955 suara (7,88%)<sup>6</sup>. Hingga tahun 2009, PKS menjadi salah dua partai yang suaranya terus meningkat dalam setiap ajang Pemilu yang diikutinya, bersama dengan Partai Demokrat.

---

<sup>3</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Arif Susanto, Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI 2013, pada 29 September 2013.

<sup>4</sup> Lihat, Hidayat. *Jurnal Psikologi Sosial Universitas Indonesia*. No. 3/Volume 13/September/2007.

<sup>5</sup> Lihat, Lili Romli, *Jurnal Penelitian Politik*, Reformasi Kelambagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia. No. 1/Volume 5. Jakarta: LIPI Press. 2008. hlm. 55

<sup>6</sup> <http://kpu.go.id>, diunduh pada tanggal 26 Desember 2012, pkl. 19.12 WIB

Salah satu faktor kesuksesan kedua sayap organisasi bentukan gerakan *tarbiyah* ini diantaranya disebabkan karena sistem kaderisasi yang dijalankan. Baik KAMMI maupun PKS sebagai garda gerakan *tarbiyah*, menjalankan sistem kaderisasinya secara matang dan berjenjang. Sekalipun berbeda dalam credo gerakan – *interest group* dan partai politik – namun karena nuansa dan pelaksanaan sistem *tarbiyah* yang kental, menjadikan kedua lembaga ini dapat berjalan secara baik.

Secara aktif, jika menilik konsep kaderisasi yang dijalankan oleh KAMMI dan juga PKS, secara kasat mata sesungguhnya cenderung mengindikasikan adanya pola yang seragam. Jelas, karena credo utama serta fitrah dari embrio kedua organisasi ini memang dimotori oleh paham yang seragam pula, *tarbiyah*. Konsepsi *tarbiyah* jika diartikulasikan kedalam bahasa sederhana merupakan suatu cara yang menekankan pada penggerakan pola-pola syiar dakwah secara *kaffah* (menyeluruh) kepada jamaah, dengan kata lain metode ini cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif melalui media agama sebagai fondasi utamanya. Sistem kaderisasi *tarbiyah* itu sendiri mengedapankan logika bahwa setiap kader harus melebarkan diri dengan merekrut minimal satu orang dimana jika satu tahun bertambah satu (sebagai angka minimal), mirip konsep rekrutmen *Multi Level Marketing* (MLM) dalam dunia ekonomi, tak heran jika

dalam lima tahun terjadi lipatan yang sangat besar<sup>7</sup>. Metode tarbiyah ini mengadaptasi transmisi ideologi dan metode gerakan Ikhwanul Muslimin<sup>8</sup>.

Pembinaan kader dilaksanakan dalam pembentukan kelompok-kelompok kajian keIslaman, secara berkelanjutan. Sistem ini lebih dikenal dengan *halaqah/liqo/usrah*, atau 'mentoring'. Sistem ini memungkinkan kesolidan kader terjaga secara masif, dan telah dijalankan pada masa-masa kejayaan Islam di zamannya. Dengan dugaan adanya hubungan afiliasi dalam hal pengkaderan ini, maka dengan logika sederhana dapat dijabarkan bahwa akan terjadi segala bentuk agregasi kepentingan diantara keduanya. Bahkan Burhanuddin Muhtadi begitu gamblang memosisikan KAMMI sebagai 'sayap kemahasiswaan PKS' yang mengisyaratkan adanya dominasi partai politik atas gerakan mahasiswa<sup>9</sup>.

Timbulnya fenomena ini sejatinya merupakan sebuah diskursus yang telah terjadi berkepanjangan. Dimana *interest group* dapat menjalin relasi yang harmonis dengan partai politik. Perdebatan mengenai sah atau tidaknya hubungan yang dijalin diantara KAMMI maupun PKS, sejatinya telah membuat beberapa kubu pengamat gerakan sosial berbeda dalam pendapat. Kubu pertama menilai bahwa gerakan mahasiswa haruslah menjalankan fungsinya sebagai penyalur kepentingan rakyat dengan mempertahankan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral. Gerakan moral ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari fitrah alamiah gerakannya. Arief

---

<sup>7</sup> Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 63

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 55

<sup>9</sup> Burhanuddin Muhtadi. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG, 2012. hlm. 45

menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa sudah selayaknya membawa nilai-nilai moral dalam azas perjuangannya. Secara tegas Arief menentang adanya kepentingan lain yang dibawa mahasiswa selain penyaluran gerakan moral, utamanya kepentingan politik.

Disisi lain tak sedikit juga para aktivis yang beranggapan bahwa gerakan mahasiswa bukan hanya terpusat pada gerakan moral saja, melainkan harus turut terlibat aktif dalam gerakan politik yang ada demi terwujudnya perubahan dalam tatanan sosial secara dinamis. Jika mahasiswa mengambil perannya pada kekuatan politik, peran mahasiswa tak ubahnya sebagai seorang politisi secara utuh. Memang ini bukan sesuatu yang salah, namun kecenderungan yang terlalu kuat pada paradigma kekuasaan akan memudahkan konsentrasi untuk membangun organisasi sesuai dengan tujuan semula<sup>10</sup>. Posisi inilah yang dirisaukan pelbagai pihak, jika gerakan mahasiswa berubah menjadi gerakan politik, boleh jadi mereka terjebak oleh *vested interest* rezim yang sedang berkuasa<sup>11</sup>.

Berbekal masalah yang terjadi, maka menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mengungkap pelbagai ihwal relasi yang dijalin diantara proses kaderisasi yang dijalankan oleh kedua sayap gerakan *tarbiyah* ini.

---

<sup>10</sup> Tomi Lebang. *Berbekal Seribu Akal Pemerintahan Dengan Logika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007, hlm.268

<sup>11</sup> Lihat, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sunyoto Usman. *Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik ataukah Gerakan Moral?*

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Kaderisasi KAMMI**

Proses pengkaderan yang dijalankan KAMMI, sejatinya tak mengenal sistem *halaqah*. Secara formal – tertera dalam AD/ART KAMMI – pembinaan kader, dilangsungkan dengan sebuah *training* keorganisasian bernama *Daurah Marhalah* (DM). DM dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Pra DM, DM 1, DM 2, hingga DM 3. Dalam AD/ART KAMMI, seorang anggota dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis anggota, yakni anggota biasa 1 (AB 1), anggota biasa 2 (AB 2), dan anggota biasa 3 (AB 3)<sup>12</sup>. Jenjang anggota biasa 1 didapatkan setelah seseorang mengikuti pelatihan DM 1. Pun begitu dengan anggota biasa 2, yang sudah wajib dinyatakan lulus dalam DM 2, serta anggota biasa 3 apabila telah memenuhi prasyarat dalam DM 3.

Proses pengkaderan yang diimplementasikan KAMMI, sejatinya termaktub dalam sebuah pedoman manual, bernama Manhaj Kaderisasi. . Dalam Manhaj Kaderisasi inilah diatur pelbagai jenis, prasyarat, mekanisme kaderisasi yang niscaya dijalankan oleh KAMMI. Selain itu, untuk membentuk kader-kader yang memiliki kualitas keIslaman yang bonafide, dalam proses kaderisasi dikenal dengan metode Indeks Jati Diri Kader (IJDK)<sup>13</sup>. IJDK berisi aspek-aspek penilaian materi tertentu, seperti nilai-nilai *aqidah*, *akhlak*, wawasan sosial, kepemimpinan, dll. yang juga merupakan sebuah komponen untuk menandakan

---

<sup>12</sup> Lihat ART KAMMI Pasal 3 Jenjang Keanggotaan

<sup>13</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Arif Susanto, Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI 2013, pada 29 September 2013

tolak ukur keberhasilan dari tujuan kader yang hendak dicetak sesuai dengan jenjang keanggotaan.

Namun, dalam menjalankan roda keorganisasian, KAMMI tak hanya melakukan jenjang kaderisasi yang diatur dalam AD/ART maupun Manhaj Kaderisasi saja. Melainkan juga turut mengadaptasi pola-pola kaderisasi yang diterapkan oleh gerakan-gerakan Ikhwan di Mesir – mengingat KAMMI juga berasal dari rahim gerakan *tarbiyah*.

Adalah *halaqah* yang menjadi sarana primer proses pengkaderan yang dibina, secara informal – tidak tertera dalam AD/ART KAMMI – mengadaptasi pola rekrutmen anggota ala *tarbiyah*. Istilah *halaqah* (lingkaran) biasa digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil muslim yang secara rutin megkaji ajaran Islam. Jumlah peserta dalam kelompok kecil tersebut berkisar 3-12 orang. Mereka mengkaji Islam dengan *Manhaj* (kurikulum) tertentu. Lazimnya, *halaqah* dipimpin dan dibimbing oleh seorang *murabbi* (pembina). Sedangkan peserta *halaqah* biasa disebut *mutarabbi* (peserta)<sup>14</sup>.

Dalam istilah ke-KAMMI-an, *halaqah* lebih akrab disebut dengan *liqo*. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaannya, *liqo* merupakan sebuah kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-12 orang. Hal ini juga menandakan bahwa tak selalu setiap kader KAMMI yang menjalankan *liqo* secara bersama-sama. Jadwal masing-masing *liqo* menyesuaikan jadwal anggota personal tiap grup *liqo*, bersama sang *murabbi*. Umumnya, *liqo*

---

<sup>14</sup> Djony Edward. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: Harakatuna Publishing. 2004. hlm. 17.

dilaksanakan minimal satu kali dalam seminggu di tempat yang juga telah menjadi kesepakatan bersama antara *murabbi* dengan *mutarabbi*. Jadi, amat sangat mungkin terjadi jadwal *liqo* diantara tiap-tiap grup yang tak berjalan seiringan dengan grup *liqo* yang lainnya.

Dalam perjalanannya, *liqo*, yang dijalankan oleh kader-kader KAMMI tak lepas dari pelbagai campur tangan aktor yang terlibat didalamnya, termasuk para tentor yang memberikan materi-materi. Tak terkecuali, daripada materi yang turut diberikan oleh kader-kader PKS.

## **B.2 Kaderisasi PKS**

Jika ditilik secara jenis, kaderisasi yang dipraktekkan dalam tubuh PKS dilakukan dengan dua tipe kaderisasi<sup>15</sup>. Kaderisasi pertama, dapat disebut rekrutmen *fardhi*. Rekrutmen secara *fardhi* dapat diartikan bahwa jenis pendekatan yang dilakukan dalam proses rekrutmen ditempuh dengan cara-cara persuasif antara kader kepada calon anggota, yang didasarkan kepada rekomendasi yang diberikan oleh *murabbi*. Dapat dikatakan, rekrutmen secara *fardhi* ini hanya secara personal berupa himbauan, ajakan kepada calon anggota. Jenis yang kedua, yakni rekrutmen *jama'i*. Rekrutmen *jama'i* inilah yang dilakukan secara masif dan massal, dan biasa ditempuh dengan jalur kepartaian, dan jalur *tarbiyah*. . Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS ditempuh melalui dua cara. *Pertama*, secara jalur kepartaian – formal. *Kedua*, kaderisasi jalur *tarbiyah* – informal.

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 18.

Jenjang keanggotaan yang ada dalam PKS – menurut AD/ART, diklasifikasikan kedalam 7 tingkatan anggota. Anggota pemula; anggota muda; anggota madya; anggota dewasa; anggota ahli; anggota purna; dan anggota kehormatan<sup>16</sup>. Jenis-jenis pelatihan kepartaian, sebagai sarana pengkaderan partai di PKS dibagi kedalam tujuh jenjang. Jenjang yang paling awal dilakukan melalui Training Orientasi Partai (TOP) 1. Setelah itu, dilanjutkan dengan Training Orientasi Partai (TOP) 2; Training Dasar (TD) 1; Training Dasar (TD) 2; Training Lanjutan (TL) 1; Training Lanjutan (TL) 2; dan yang terakhir adalah Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS)<sup>17</sup>.

Dalam pengkaderan tahap awal yakni TOP 1, para calon anggota partai diberikan pemahaman awal mengenai struktur kepartaian, serta sejarah serta eksistensi sepanjang perjalanan PKS. Setelah mengikuti TOP 1 ini, anggota partai secara resmi menyandang status sebagai anggota pemula terdaftar, yang juga dapat segera memiliki kaitrtu anggota partai. Dalam tahap selanjutnya, seorang yang telah lulus dalam TOP 1 ini akan dibina dalam forum yang lebih intim lagi, yakni melalui Taklim Rutin Partai (TRP) yang formatnya merupakan pengajian rutin, serta pendalaman materi-materi keIslaman yang kelak dipimpin oleh seorang *murabbi*.

Seorang anggota pemula terdaftar yang telah dirasa cukup mumpuni, serta layak bagi *murabbi* untuk mengikuti jenjang pengkaderan selanjutnya, akan direkomendasikan untuk menapak kedalam Training Orientasi Partai (TOP) 2.

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 19

<sup>17</sup> M. Imdadun Rahmat. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta. LkiS Yogyakarta: 2008. hlm. 274

Peserta yang telah melalui jenjang pengkaderan TOP 2 ini berhak menyandang status sebagai anggota pemula terbina yang memiliki kewajiban untuk mengikuti beberapa serangkaian kegiatan tambahan partai, yakni Taklim Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), serta Kegiatan Internal Partai (KIA).

Untuk mendapatkan gelar anggota muda, seorang anggota pemula wajib terlebih dahulu menjalani training kepartaian lanjutan berupa Training Dasar (TD) 1, dan TD 2. Prasyarat untuk dapat menjalankan TD 1, seorang anggota pemula harus telah mendapatkan sebuah keterangan berupa Surat Kelulusan Anggota Pemula/Kartu Tanda Anggota Pemula (SKAP/KTAP). Bagi anggota pemula yang dinyatakan lulus dalam TD 1, maka statusnya berubah menjadi seorang anggota muda. Kegiatan anggota muda lainnya, selain TRK, PPK, dan KIA, yakni mengikuti Kajian Ilmu Sosial Politik 1 (KISP 1).

Setelah dinyatakan cukup kompeten oleh *murabbi* untuk menjalani jenjang pengkaderan berikutnya, yakni TD 2. Maka seorang anggota muda akan kembali direkomendasikan sang *murabbi* untuk menjalani TD 2. Lulusan dari TD 2 ini akan menyandang predikat anggota madya. Jenjang pengkaderan selanjutnya dalam kaderisasi PKS, yakni adanya Training Lanjutan (TL) 1. Seorang anggota madya yang telah lulus dalam TL 1 ini berhak mendapatkan status baru, yakni sebagai anggota dewasa.

Setelah dinyatakan lulus dan menyandang gelar anggota dewasa, maka alur pengkaderan selanjutnya yakni menjalani Training Lanjutan (TL) 2. Seorang

yang tengah, dan telah dinyatakan lulus dari TL 2 ini akan memperoleh gelar sebagai anggota ahli. Selanjutnya alur pengkaderan tertinggi di PKS, adalah Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). TMKS dapat diikuti oleh seorang anggota ahli yang hendak menaikkan jenjang keanggotaannya di PKS menjadi seorang anggota purna. Sebetulnya, selain anggota purna yang merupakan jenjang pengkaderan tertinggi di PKS, ada status anggota kehormatan yang dapat diperoleh tanpa melalui proses kaderisasi. Anggota kehormatan ini dapat disematkan oleh pengurus partai kepada seorang kader yang dirasa telah memiliki sumbangsih besar, serta figur ketokohnya yang dianggap dapat dijadikan panutan dalam tubuh internal partai.

Seragam dengan proses kaderisasi secara informal yang dijalankan oleh KAMMI, *halaqah* dalam PKS juga dilakukan demi proses pembinaan kader secara masif. Dalam *halaqah* PKS, keseluruhan materi telah terangkum dalam pedoman manual Manhaj *Tarbiyah* PKS, yang bentuknya juga diserupai dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI. Dalam Manhaj *Tarbiyah*, dijelaskan pelbagai sarana-sarana pengkaderan secara detil, dari model hingga masuk kedalam implementasinya. Lazimnya, sarana pengkaderan dengan metode *tarbiyah* dalam IM ini dilakukan dalam bentuk-bentuk ceramah (*daurah*), ceramah singkat (*tausyiah*), seminar, penugasan, bedah buku, kemah, mabit, rekreasi (*rihlah*), ibadah khusus (*tarhib*) ramadhan. Keseluruhan kegiatan itu dilaksanakan, disamping sarana primernya, yakni *halaqah*.

### C. ANALISIS DATA

Setelah kita mengetahui pelbagai jenis kaderisasi yang dijalankan oleh KAMMI, maupun PKS, baik secara formal maupun informal. Sesungguhnya dapat mengerucutkan opini kita pada satu kesimpulan, bahwa terjadi persinggungan yang aktif diantara pola kaderisasi kedua lembaga tersebut. Pola afiliasi yang dijalin diantara KAMMI dan PKS memang terjadi secara alamiah, dan sangat intim. Hal ini terjadi mengingat kedua lembaga ini memang lahir dari sebuah rahim yang sama, rahim *tarbiyah*.

Adanya sistem kaderisasi yang seragam, yakni secara *tarbiyah* dengan terdapatnya model pengkaderan metode *halaqah* membuat nafas KAMMI dan PKS terlihat samar. Dengan kerangka logika yang sama, maka adalah wajar jika seorang kader KAMMI yang memiliki catatan *liqo* yang cukup baik, akan dapat diterima secara baik pula ketika hendak melamar menjadi seorang anggota kader PKS yang juga mengenal *halaqah* sebagai formulasi dalam pencarian bibit-bibit kader yang bermutu

Akibat dari pelbagai persinggungan intim ini, tak jarang pengejawantahan KAMMI merupakan *underbow* PKS, ataupun KAMMI berafiliasi secara politik dengan PKS memang kerap terjadi. Meskipun secara normatif, persinggungan KAMMI dan PKS tak terdapat dalam AD/ART masing-masing. Namun secara praktek informal – khususnya dalam hal kaderisasi, gradasi antara KAMMI dan PKS terlihat sangat jelas.

Dalam kajian analisis lebih lanjut, acap kali pelbagai teori pergerakan – pergerakan mahasiswa utamanya, abai dengan relasi kekuasaan serta politik yang menjadi misi utama dalam menjangkau negara. Teori-teori pergerakan lebih asyik menelaah relasi yang terjalin diantara *interest group* dan partai politik ini dari sudut pandang paradigma sosial, serta kegagalan ideologis. Pelbagai analisis terfokus pada perilaku pergerakan mahasiswa, yang semakin lari dari tabiat gerakan moral karena disebabkan perubahan kondisi sosial serta budaya yang hinggap.

Selama ini, perspektif semakin majunya teknologi serta merebaknya budaya populer dikalangan mahasiswa selalu dijadikan biang keladi dari mundurnya sebuah gerakan mahasiswa. Belum lagi permasalahan bagaimana organisasi gerakan mahasiswa yang saat ini gagal mengartikulasi makna ideologi dari credo yang diusung para pendahulu organisasinya, yang kian hari dirasa menjadi dalang utama mundurnya kekuatan bernama gerakan mahasiswa. Hal ini semakin menjadi-jadi ketika slogan manis mahasiswa sebagai *agent of change*, *agent of social control* hanya menjadi kata-kata penyemangat – menghindari kata slogan sesat – karena fakta empirik dilapangan justru merupakan antitesa serta inversi dari keyakinan-keyakinan tersebut.

Namun dengan adanya temuan ini, para analis pergerakan semakin sadar bahwa tak melulu kedua faktor tersebut yang menyebabkan eksistensi gerakan mahasiswa dewasa ini dianggap kurang memiliki daya saing, maupun daya tawar (*bargaining position*) yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Para penggiat gerakan mahasiswa saat ini lebih terlarut dalam megahnya relasi kekuasaan, pun

panggung politik praktis yang memang disediakan bagi para partai politik. Relasi jaringan yang ditawarkan oleh infrastruktur politik ini, begitu menggiurkan bagi para aktivis gerakan mahasiswa maupun para politisi itu sendiri.

Setidaknya ada dua keuntungan yang dapat dibaca dari relasi yang dibangun dari dua jenis lembaga – *interest group* dan partai politik, ini. *Pertama*, jenis relasi keatas yang diharapkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa. Jenis relasi keatas ini dapat dimaksudkan bahwa dengan bersenyawanya mereka kedalam kekuatan politik yang memang diporsikan oleh partai politik, maka para aktivis mahasiswa memiliki keuntungan jaringan ke tingkat yang lebih elit.

*Kedua*, relasi kebawah yang turut diharapkan oleh para elit partai politik demi memanfaatkan kekuatan mahasiswa sebagai ladang dukungan politik. Tak dapat dipungkiri bahwa relasi yang dibangun ini diibaratkan sebagai hubungan antara sang burung jalak yang hinggap di seekor kerbau, menandakan adanya hubungan mutualisme. Relasi keatas, berupa jaringan yang diharapkan oleh aktivis mahasiswa juga ternyata turut diharapkan oleh para politisi partai politik. Bedanya, relasi ini lebih bersifat kebawah dibanding relasi yang coba dikonstruksikan oleh para aktivis. Dengan jaringan kebawah yang juga diinisiasi oleh para elit partai politik ini, pelbagai kepentingan politik yang diusung oleh tiap-tiap partai dapat tersalurkan secara baik, dengan dukungan yang dimotori oleh gerakan-gerakan mahasiswa tersebut.

## D. PENUTUP

### D.1 Simpulan

Dalam perihal kaderisasi, baik KAMMI maupun PKS memiliki pola rekrutmen yang seragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis kaderisasi yang dijalankan kedua lembaga tersebut secara informal. Bentuk pengkaderan yang diterapkan oleh KAMMI dan PKS sama-sama mengadaptasi pola rekrutmen anggota yang khas ala gerakan *tarbiyah*, yakni melalui sistem *halaqah/liqo/usrah*. Sistem yang juga disadur dalam organisasi besar Islam, Ikhwanul Muslimin di Mesir ini memang menjadi ciri utama pola pengkaderan, yang mengutamakan kelompok-kelompok kecil dalam mentransformasi gagasan-gagasan keIslamannya.

Adanya kesamaan pola kaderisasi yang dijalankan KAMMI dan PKS, bukanlah tanpa sebab. Hal ini menjadi sebuah hal yang lazim jika meninjau sejarah kelahiran masing-masing lembaga yang terlebih dahulu dibidani oleh sebuah gerakan bernama *tarbiyah*. Baik KAMMI maupun PKS memang terlahir dari rahim yang sama, rahim *tarbiyah*. Adalah sebuah kewajaran apabila hari ini dapat ditilik secara gamblang, terdapat kesamaan metode yang diterapkan dalam proses pembinaan kader.

Sejatinya, adanya temuan mengenai afiliasi yang terjadi diantara kedua lembaga berbeda kepentingan ini, merupakan sebuah sinyalemen adanya negasi dari pelbagai teori yang selama ini menaungi gerakan sosial, khususnya gerakan mahasiswa. Hal ini juga mendeskripsikan adanya sebuah distorsi, fitrah *interest*

*group*, terhadap partai politik. Teori Arief Budiman, seorang aktivis pergerakan mahasiswa era 1966 yang mencoba memisahkan kepentingan gerakan moral – yang diusung oleh mahasiswa – dengan kepentingan gerakan politik – yang dibawa oleh partai politik, seolah terbantahkan.

Sebagai konsekuensi logis akibat pola afiliasi yang dijalin kedua lembaga tersebut, pelbagai kebijakan yang diambil baik dari KAMMI maupun PKS, tak sedikit kerap terlihat samar antara kebijakan yang murni untuk organisasi, ataupun kebijakan yang sengaja dibuat demi kepentingan yang lain. Hal ini juga acap menimbulkan persepsi di masyarakat, tentang konstruksi yang selalu sebangun antara KAMMI dan PKS. Pun dengan persepsi bahwa KAMMI yang merupakan sebuah *underbow* PKS. Meskipun secara garis keorganisasian tak ada sangkut paut diantara keduanya.

## **D.2 Saran**

Berdasarkan paparan kesimpulan yang tertera sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan KAMMI maupun PKS dalam proses menjalin sebuah hubungan yang ideal, antara *interest group* dan partai politik. Adapun saran-saran tersebut, yakni:

1. Baik KAMMI maupun PKS sudah selainnya dapat memainkan peran yang ideal diantara *interest group* dan parta politik dalam ranah kenegaraan. Sehingga tak terjadi tumpang tindih kepentingan diantara

keduanya. Hal ini juga penting demi terjaganya citra dan kejernihan pemahaman kedua jenis lembaga tersebut dimata masyarakat.

2. Dalam hal kaderisasi, perlu adanya sekat diantara pola kaderisasi dalam organisasi yang bersifat formal maupun informal. Hal ini dimungkinkan demi menghasilkan kualitas kader yang tak hanya baik dan loyal, melainkan juga dapat memahami perihal keorganisasian secara detail, termasuk pelbagai elemen yang melekat dalam organisasi.
3. Proses pembinaan kader melalui metode *halaqah* merupakan sarana yang cukup efektif demi proses transfer gagasan serta menjaga militansi kader. Namun tak bisa disangkal bahwa metode ini rawan akan tingkat kejenuhan, untuk menanggulangi itu perlu adanya inovasi dalam *halaqah*, demi menjaga kesolidan.

## DAFTAR RUJUKAN

Ali Said Damanik. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002.

AD/ART KAMMI

Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010

Burhanuddin Muhtadi. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG, 2012

Djony Edward. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: Harakatuna Publishing. 2004.

Hidayat. *Jurnal Psikologi Sosial Universitas Indonesia*. No. 3/Volume 13/September/2007. diunduh pada 9 November 2012, pkl. 20.15 WIB.

M. Imdadun Rahmat. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta. LkiS Yogyakarta: 2008.

Sunyoto Usman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik ataukah Gerakan Moral?* No. 2/Volume 3/1999. diunduh pada 15 November 2012, pkl. 21.03 WIB.

Tomi Lebang. *Berbekal Seribu Akal Pemerintahan Dengan Logika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007

<http://kpu.go.id>